

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari uraian yang telah disampaikan sampai kepada pembahasan, peneliti secara umum menyimpulkan bahwa implementasi upaya Bela Negara terus dilaksanakan oleh Pemerintah. Dimana saat ini Pemerintah melalui Kemhan RI melaksanakan program PKBN (Pembinaan Kesadaran Bela Negara). Kemhan RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menyerahkan penyelenggaraan Bela Negara kepada Ditjen Pothan, Badiklat Kemhan, Ditjen Strahan dan Unhan RI. Ditjen Pothan membawahi salah satu direktorat yaitu Direktorat Bela Negara sebagai pelaksana program Bela Negara di tiga lingkup yang sudah ditentukan. Khusus untuk lingkup pendidikan sesuai jenjang pendidikan dalam Sisdiknas, program Bela Negara dilaksanakan oleh Subdit Lingkungan Pendidikan (Subdit Lingdik) dengan pola Internalisasi (Sosialisasi dan Diseminasi).

##### **5.1.1 Upaya Kemhan RI dalam Merumuskan Kebijakan, Penyusunan Aturan terkait Program Bela Negara dalam Lingkup Pendidikan**

Upaya Kemhan dalam merumuskan kebijakan dan menyusun aturan terkait lingkup pendidikan dilakukan bersamaan dengan lingkup lainnya. Dimana kebijakan dan aturan yang telah diterbitkan oleh Kemhan adalah hasil perumusan bersama dari bagian-bagian terkait, termasuk bidang pendidikan. Dalam hal ini Subdit Lingdik melaksanakan penyiapan dan pengumpulan bahan-bahan terkait bidang pendidikan sebagai bagian dari bahan untuk dibahas dalam pokja yang sudah ditetapkan. Dalam pembahasan untuk perumusan kebijakan maupun penyusunan aturan Kemhan RI selalu melibatkan instansi maupun bagian lain. Kemudian pola penyebaran program Bela Negara melalui integrasi ke dalam Sisdiknas adalah wujud kesemestaan yang berarti implementasi program Bela Negara adalah untuk kepentingan bersama.

Dari rencana perolehan manfaat yang diharapkan adalah terbentuknya perilaku Bela Negara pada seluruh jenjang pendidikan sesuai Sisdiknas. Pemberian sertifikat Kader dan Fasilitator Bela Negara telah dilaksanakan kepada sasaran/ target bidang pendidikan. Penamaan mata pelajaran Bela Negara tidak dicantumkan secara langsung, tetapi di dalam mata pelajaran/ mata kuliah tertentu terdapat materi Bela Negara. Upaya-upaya lain yang dilakukan untuk membangun konstruksi makna antara lain dengan penetapan hari Bela Negara setiap tanggal 19 Desember. Memperluas jaringan dengan terus melaksanakan Internalisasi dan Ditlat serta melaksanakan melaksanakan *MoU* dengan Kementerian/ Lembaga dan pihak-pihak lain. Melaksanakan program-program Bela Negara jangka pendek dengan nama dan tampilan program yang akrab dalam pandangan dan pendengaran, sehingga mudah dipahami masyarakat. Kemudian memperkuat payung hukum dan tataran pelaksanaan Bela Negara dengan *update*, merevisi kebijakan dan aturan yang sudah tidak adaptif lagi.

Tingkat perubahan yang diharapkan telah dicantumkan di dalam kebijakan dan aturan, tetapi belum ada pelaksanaan monitoring yang melekat kepada anak-anak didik pada setiap jenjang pendidikan. Monitoring ini sangat penting untuk mengetahui perkembangan terintegrasinya program Bela Negara dalam Sisdiknas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya personil Subdit Lingdik jumlahnya tidak sesuai dengan daftar susunan personil (DSP) yang sudah ditetapkan. Kemudian dari segi anggaran masih belum terlaksananya komitmen pemenuhan anggaran, dimana terjadi pengalihan kegiatan atau pemangkasan kegiatan.

### **5.1.2 Pelaksanaan Kegiatan Program Bela Negara Pada Subdit Lingdik Direktorat Bela Negara**

Secara umum pelaksanaan program Bela Negara pada Subdit Lingdik terlaksana dengan baik, walaupun terjadi pemangkasan beberapa kegiatan di tahun berjalan. Subdit Lingdik adalah jabatan setingkat eselon

III yang dijabat oleh seorang berpangkat Kolonel, dibawah Direktorat Bela Negara yang dijabat oleh Pati Bintang Satu dengan cakupan tugas dan fungsi yang sangat luas.

Selanjutnya adanya komitmen dari Pemerintah terkait keberlanjutan penyelenggaraan program Bela Negara adalah jaminan secara komitmen. Kemhan juga sudah menetapkan bahwa untuk dapat melaksanakan program Bela Negara harus sudah memiliki sertifikat Fasilitator. Pelaksanaan Internalisasi maupun Diklat Bela Negara belum dilaksanakan kepada pejabat pemerintahan maupun lembaga-lembata tinggi negara lainnya. Karakter komitmen Pemerintahan sudah dapat dipastikan mendukung program Bela Negara, tetapi secara tindakan masih dalam proses. Sehingga secara umum dapat dikatakan karakteristik pemerintah masih sebatas komitmen belum berkarakter tindakan.

Kepatuhan masyarakat dan tanggapan terhadap program Bela Negara sangat tinggi yang merupakan peluang bagi penyelenggara program Bela Negara untuk lebih intens lagi.

### **5.1.3 Birokrasi Mekanisme Penyelenggaraan Program Bela Negara di Subdit Lingdik Direktorat Bela Negara**

Birokrasi yang dilaksanakan sesuai dengan tatanan yang ada, berdasarkan dengan tugas dan fungsi Subdit Lingdik, Dit Bela Negara, Ditjen Pothan. Kekuasaan, kepentingan dan strategi yang melekat kepada para penyelenggara program Bela Negara dmanfaatkan sesuai kewenangan masing-masing. Belum terlihat adanya perubahan signifikan dalam tatanan birokrasi yang ada untuk lebih memberi arti pada kekuasaan, kepentingan dan strategi yang melekat kepada para penyelenggara program Bela Negara. Pembekuan keberadaan Kanwil Kemhan di daerah-daerah berakibat tidak berjalannya implementasi program Bela Negara dengan lancar dan memerlukan revisi terhadap tatanan birokrasi yang ada.

Komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan program Bela Negara, adalah gambaran karakteristik pemerintah. Perkembangan

penyelenggaraan program Bela Negara belum didukung dengan birokrasi yang juga harusnya menyesuaikan terhadap perkembangan yang terjadi.

## **5.2 Saran**

### **5.2.1 Upaya Kemhan RI dalam Merumuskan Kebijakan, Penyusunan Aturan terkait Program Bela Negara dalam Lingkup Pendidikan**

Membangun konstruksi makna melalui pemberian sertifikat Kader dan Fasilitator Bela Negara sangat tepat. Hal lain yang sejalan adalah pemberian nama Bela Negara pada judul mata pelajaran/ mata kuliah yang berisi materi Bela Negara pada tiap-tiap jenjang pendidikan dalam Sisdiknas. Diharapkan perlu ditambahkan dalam isi kebijakan terkait penamaan Bela Negara tersebut agar lebih mudah dipahami dan tidak menjadi sesuatu yang asing.

Luasnya cakupan lingkup pendidikan memerlukan pola monitoring/ pemantauan melekat yang tepat untuk mengetahui tingkat perubahan yang terjadi pada anak-anak didik di setiap jenjang pendidikan. Kemudian perlu penambahan personil pada Subdit Lingdik dan juga anggaran sebagai komitmen untuk suksesnya pelaksanaan program Bela Negara.

### **5.2.2 Pelaksanaan Kegiatan Program Bela Negara Pada Subdit Lingdik Direktorat Bela Negara**

Untuk mengimbangi luasnya lingkup pendidikan, perlu peningkatan kapasitas para pengawak program Bela Negara dengan penyesuaian kompetensi sesuai bidang tugasnya. Kemampuan koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga terkait, maupun instansi lainnya juga perlu ditingkatkan sebagai upaya percepatan pelaksanaan program Bela Negara dan birokrasi, untuk pencapaian tujuan program. Dalam hal ini juga perlu optimalisasi fungsi monitoring/ pemantauan pada Subdit Lingdik. Sehingga diharapkan pemantauan melekat dapat terlaksana untuk mengetahui derajat perubahan pada sasaran/ target secara tepat, sebagai komitmen penyelenggaraan usaha Bela Negara yang lebih terarah dan komprehensif.

Perlu dilaksanakan Internalisasi dan Diklat pada jajaran Pemerintahan dan Lembaga-lembaga tinggi negara lainnya sebagai wujud menjadikan setiap anak bangsa adalah agen-agen Bela Negara. Untuk pelaksanaan ini perlu pola tersendiri khususnya pelaksanaan Diklat kepada para pejabat Pemerintahan dan Lembaga-lembaga tinggi negara, mengingat usia yang sudah tidak muda lagi.

### **5.2.3 Birokrasi Mekanisme Penyelenggaraan Program Bela Negara di Subdit Lingdik Direktorat Bela Negara**

Birokrasi adalah motor penggerak kekuasaan yang juga harus diperbaharui seiring dengan perkembangan penerapan program Bela Negara. Rencana penambahan pelaksana kegiatan Bela Negara, dimana instansi lain dapat menyelenggarakan Internalisasi maupun Diklat dengan persyaratan-persyaratan khusus, akan membentuk birokrasi baru. Oleh karena itu perlu dibuat konsep birokrasi yang tepat untuk kelancaran pelaksanaan program Bela Negara. Keberadaan perwakilan Kemhan di daerah perlu ditinjau kembali untuk diadakan lagi, agar fungsi Ditjen Strahan dapat berjalan, sebagai yang membawahi Kanwil Pertahanan di daerah.

Perlu dilaksanakan pemetaan pelaksanaan Internalisasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Bela Negara dan Subdit Lingdik, mengingat banyaknya jenjang pendidikan dalam Sisdiknas. Selanjutnya perlu adanya kerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dapat mempolakan birokrasi yang tepat. Hal ini untuk dapat menciptakan birokrasi yang profesional dan adaptif yang merupakan karakteristik dari pemerintahan.